

Antisipasi Kemacetan

Warga Fatmawati Tunggu Realisasi Janji Jokowi

JAKARTA, KOMPAS – Menyongsong pembangunan transportasi cepat massal (MRT), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan sejumlah pengaturan lalu lintas saat konstruksi. Diperkirakan, pada titik pembangunan stasiun dan pemasangan tiang pancang rawan kemacetan parah.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Minggu (5/5), mengatakan, saat pekerjaan dimulai nanti, gangguan lalu lintas pasti terjadi, seperti pengurangan lajur jalan di lokasi konstruksi. "Kami telah berkoordinasi dengan PT MRT Jakarta untuk mengatur agar kendaraan tetap bisa melintas," katanya.

Pristono memperkirakan, kemacetan parah akibat penyempitan jalan bakal terjadi di area sekitar stasiun, tiang pancang, dan lokasi pengeboran. Total ada 13 stasiun yang menurut rencana dibangun pada fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia).

Sebanyak tujuh di antaranya stasiun layang, yaitu di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisinga-mangaraja.

Pengaturan lalu lintas selama konstruksi yang disiapkan dinas perhubungan berupa penggeseran jalan; jalur pengalihan, dan pengalihan waktu konstruksi. "Kami menjaga jumlah lajur jalan tetap sama pada saat konstruksi. Namun, lebar tiap lajur pasti berkurang," kata Pristono.

Kendaraan juga dapat dialihkan melalui jalur alternatif di sekitar area pembangunan. Selain itu, sebagian besar pekerjaan

berat dilakukan pukul 22.00 sampai pukul 05.00. Daerah-daerah konstruksi nantinya akan terbungkus rapi. Petugas pengatur lalu lintas rambu-rambu, dan papan petunjuk disiapkan di lokasi proyek.

Diajak berdialog

Hingga kini, warga di Jalan Fatmawati dan sekitarnya ada yang menolak keputusan Pemprov DKI Jakarta membangun MRT desain layang.

"Sampai November 2012, Jokowi berjanji akan membuka kajian MRT termasuk amdal (analisis mengenai dampak lingkungan)-nya. Bahkan ada usulan membuat tim kecil yang menggendeng perwakilan warga. Namun, itu tidak terealisasi dan justru diputuskan MRT tetap layang," kata Ngadiran, pedagang Pasar Blok A-Fatmawati yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.

Direktur Eksekutif Institut

Studi Transportasi Darmaningtyas menyatakan dukungannya kepada warga yang menolak MRT layang.

Kepala Humas PT Palya Meyritha Maryani mengkhawatirkan ada jaringan pipa air bersih yang terganggu. "Bila ada jaringan pipa terdampak proyek MRT, siapa yang harus menanggung pemindahan jaringan air minum? Kami memerlukan kepastian ini sebab terkait investasi usaha," katanya.

Meyritha mengatakan, sampai saat ini, belum ada penjelasan di bagian mana jaringan pipa air bersih yang kemungkinan terkena dampak proyek.

Alvinsyah, anggota Kelompok Ilmu Transportasi Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, mengingatkan agar pelaksana proyek mematuhi analisis amdal. Upaya itu perlu agar dampak buruk proyek dapat dihindari.

"Dokumen amdal juga bisa menjadi kendali kualitas pekerjaan," katanya. (NEL/FRO/NDY)